

**PERAN KEPEMIMPINAN TOKOH ADAT ETNIS BAJAWA DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH DI KECAMATAN AIMERE KABUPATEN
NGADA PROVINSI NTT**



SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu
Administrasi Negara pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas BOSOWA Makassar.**

OLEH

VINCENTIO MARIANO SAI

4512021031

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2016

ABSTRAK

PERAN KEPEMIMPINAN TOKOH ADAT ETNIS BAJAWA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KECAMATAN AIMERE KABUPATEN NAGADA PROVINSI NTT

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan tokoh adat etnis bajawa dalam pembangunan daerah di kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada Provinsi NTT dan faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam tokoh adat etnis Bajawa bagi pembangunan daerah di Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi NTT.

Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengetahui gaya kepemimpinan tokoh adat etnis Bajawa dalam pembangunan daerah di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada Provinsi NTT dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam tokoh adat etnis Bajawa bagi pembangunan daerah di Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi NTT.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan mengenai peran kepemimpinan tokoh adat etnis Bajawa di dalam pembangunan daerah di Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi NTT, ternyata dapat di simpulkan bahwa peran kepemimpinan tokoh adat etnis Bajawa dalam pembangunan daerah di Kecamatan Aimere Kabupaeten Ngada ini, belum efektif dan masih mengalami kendala atau masih ada faktor-faktor penghambat dalam pembangunan daerah di Kecamatan Aimere, yaitu rendahnya tingkat pendidikan,kekurangan teknologi dan informasi serta adat istiadat leluhur yang kaku merupakan kendala bagi tokoh-tokoh adat etnis Bajawa dalam membantu pembangunan daerah. .

Faktor yang berpengaruh dalam kepemimpinan tokoh adat etnis Bajawa bagi pembangunan daerah di Kecamatan Aimere,Kabupaten Ngada Provinsi NTT yakni,dalam bidang pendidikan,tokoh adat dalam brbagai bentuk cara slalu menekankan anak-anak muda untuk tetap sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Di Kecamatan Aimere terdapat pendidikan non formal serta kursus keterampilan bagi generasi muda dan masyarakat yang di kelola oleh sanggar kegiatan belajar (SKB Ngada) dengan kegiatannya adalah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Paket A dan B yang di kelola oleh cabang Dinas PKPO.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* (Negara Kesatuan), maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.

Daerah Indonesia terbagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersedai atas permusyawaratan.

Pembangunan dalam masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang pada dasarnya berhasil jika masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Di tengah masyarakat yang beraneka ragam suku dan

budaya,tentunya mempunyai nilai seperti : nilai kekeluargaan, kegotongroyongan,kejuangan dan yang khas pada masyarakat kita, sehingga dengan adanya nilai-nilai tersebut masyarakat mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.Pembangunan dalam masyarakat haruslah diterapkan sistem dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya suatu pembangunan yang ada di daerahnya.

Birokrasi dalam hal ini pemerintah harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan pembangunan pada daerah masing-masing dan di sini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan iklim yang menunjang setiap pembangunan.

Dalam meningkatkan pembangunan maka pemerintah haruslah mengkomunikasikan kepada masyarakat manfaat atau kegunaan setiap pembangunan yang masuk di daerahnya.Pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan haruslah mempunyai kredibilitas, daya tarik, kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan agar masyarakat dapat dipengaruhi untuk mengikuti keinginan dari pemerintah sehingga pembangunan dapat dilaksanakan.Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran,tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dan komunikasi adalah

sumber informasi bagi pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan ataupun tentang pembangunan.

Program-program pembangunan saat ini banyak difokuskan di daerah daerah pedesaan. Perhatian yang besar terhadap daerah pedesaan didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Selain itu program pembangunan di daerah pedesaan dilakukan untuk mengimbangi laju perkembangan pembangunan di daerah perkotaan.

Program-program dari pemerintah tersebut kemudian disalurkan melalui birokrasi pedesaan dan dilaksanakan atas dasar pengawasan desa. Program pembangunan membutuhkan penanganan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Untuk dapat mensukseskan program pembangunan selain dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat juga dibutuhkan pemimpin yang bersedia tampil dalam setiap pembangunan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap pelopor, berani, memberikan contoh dan teladan yang baik serta rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pedesaan ditentukan oleh beberapa hal diantaranya keterlibatan masyarakat dan kemampuan serta keterampilan pemimpin-pemimpinnya di dalam menggerakkan semangat pembangunan. Selain peran kepala desa sebagai pemimpin formal, di Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada terdapat pemimpin informal yang sering disebut kepala adat yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa. Selain sebagai pemimpin adat yang menjaga dan menegakkan nilai-nilai adat tradisional yang diyakini kebenarannya, seorang kepala adat juga berperan dalam membantu aparat pemerintah desa dan

kecamatan (pemimpin formal) guna membina dan meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Setiap wilayah kecamatan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk lebih menyukseskan pembangunan tersebut sangat dibutuhkan adanya kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah utamanya dengan pemuka-pemuka masyarakat setempat.

Dalam Negara Kesatuan RI yang berbineka Tunggal Ika ini, khususnya di Kecamatan Aimere, Nusa Tenggara Timur terdiri dari berbagai suku bangsa yang berarti pula memiliki beraneka ragam adat istiadat, bahasa, kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidupnya. Untuk mengembangkan dan membangun masyarakat yang demikian ini kita harus melihat dan bertitik tolak pada pentingnya keanekaragaman demi keutuhan dan kesatuan bangsa pada umumnya, dan kesuksesan pembangunan pada khususnya. Pembangunan merupakan tugas utama pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan membina kehidupan bangsa.

Dalam masyarakat adat/primodial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat perkotaan (urban). Masyarakat dapat digerakkan dengan memperhatikan adat setempat. Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, di ikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Dalam keanekaragaman suku bangsa ini sering kita jumpai kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya

kebiasaan-kebiasaan yang bersifat turun-temurun dari nenek moyang, seperti kebiasaan bahwa pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat diturunkan oleh leluhurnya dan ini akan berjalan terus, masyarakat yang demikian ini merupakan masyarakat yang masih tradisional. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat ini anggotanya lebih cenderung mematuhi pemimpinnya sendiri dari pada penguasa-penguasa lain yang ada disekitarnya. Apalagi penguasa-penguasa lain tadi yang dianggap tidak sejalan dengan kebiasaan yang dihormati dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan pengertian ini, dalam mensukseskan kegiatan pemerintahan khususnya pemerintahan desa maka sangat diperlukan adanya jalinan kerjasama yang serasi antar pemerintah desa dengan tokoh-tokoh/pemimpin masyarakat tadi. Dalam hubungan kepemimpinan tradisional ini di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur khususnya di daerah pedalaman kita kenal adanya sebutan kepala adat. Sebutan kepala adat ini diberikan kepada seorang yang dipilih dari antara sekelompok masyarakat tertentu sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan dalam masyarakat tersebut. Kepala adat dalam hal tertentu sangat berpengaruh didalam kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan sebatas gambaran di atas, betapa pentingnya suatu kerja sama dan koordinasi yang tetap antara pemerintah khususnya pemerintah daerah dengan pemuka-pemuka masyarakat khususnya para kepala adat dalam usaha menyukseskan program-program pemerintah dalam rangka pengembangan masyarakat yang masih bersifat tradisional tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran kepemimpinan para tokoh adat etnis bajawa dalam pembangunan daerah di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada Propinsi NTT?
2. Faktor- faktor apakah yang berpengaruh dalam tokoh adat etnis Bajawa bagi pembangunan daerah di Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Propinsi NTT ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran kepemimpinan para tokoh adat etnis bajawa dalam pembangunan daerah di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada Propinsi NTT.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam tokoh adat etnis Bajawa bagi pembangunan daerah di Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Propinsi NTT.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Universitas Bosowa

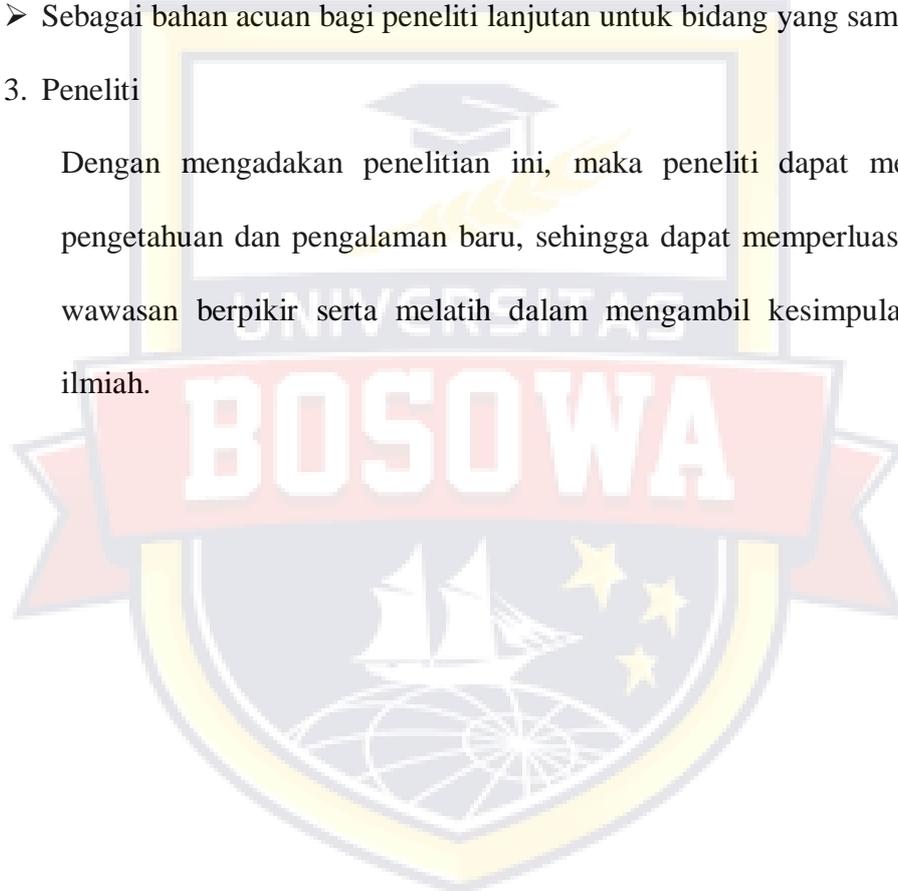
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

2. Mahasiswa.

- Agar mahasiswa peka dalam melihat masalah yang terjadi dalam masyarakat, khususnya peran tokoh adat bagi pembangunan daerah.
- Sebagai pelengkap studi kepustakaan dan sekaligus sebagai bahan informasi bagi generasi selanjutnya.
- Sebagai bahan acuan bagi peneliti lanjutan untuk bidang yang sama

3. Peneliti

Dengan mengadakan penelitian ini, maka peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru, sehingga dapat memperluas khasanah wawasan berpikir serta melatih dalam mengambil kesimpulan metode ilmiah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Peranan

Koentjaraningrat (2000) mendefinisikan peranan dalam arti yang lebih khusus yakni peranan khas yang dipentaskan oleh tindakan-tindakan individu dalam kedudukan dimana ia berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan – kedudukan lain.

Menurut Soekanto (2006:243) peranan atau (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Patton (2006:171) peran ditujukan pada pola perilaku yang diharapkan menjadi sifat untuk posisi tertentu di suatu organisasi. Peran tersebut merupakan apa yang harus dilakukan oleh seseorang guna mensahkan keberadaanya pada posisi tertentu.

Robin dan culter (2005: 66) mengungkapkan bahwa “peran merujuk keserangkaian pola perilaku yang diharapkan yang nempel pada seseorang yang menduduki posisi tertentu pada unit sosial tertentu”. Menurut Muklas (2005) pada umumnya peranan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang kedudukan yang mana dalam terjadinya suatu hal, kegiatan ataupun peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasarkan non-na/peraturan tertentu. Hal ini dapat diketahui bahwa peranan sebagai faktor dalam prilaku yang

di harapkan bisa menjadi baik dan menjadi jahat, dan peranan ini dimiliki oleh seseorang yang menduduki salah satu posisi dalam sebuah unit sosial.

Menurut Rivai (2006) peranan dapat di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam suatu organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana menanggung peranan berperilaku. Sehingga peranan dari pemimpin ini yang menentukan nasib untuk bawahannya.

Dari definisi dapat disimpulkan peranan adalah suatu rangkaian perilaku seseorang, yang timbul berdasarkan tindakan dan kemampuan seseorang untuk melakukan hak dan kewajiban berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh masyarakat.

2. Adat

Menurut Soekanto, (2006:131) adat adalah perbuatan yang menjadi pola perilaku, dan dijadikan sebagai cara atau kebiasaan yang harus dipertahankan dalam suatu masyarakat tertentu. Achmadi, (2001:71) mengatakan suatu cara untuk melaksanakan sesuatu sebagai pedoman untuk mengatur tingka laku masyarakat. Wira Admadja, (2006:37) mendefinisikan adat sebagai cara tingka laku dalam masyarakat yang biasa digunakan dalam komunitas tertentu, sedangkan adat dalam arti sempit adalah norma-norma yang mencakup sanksi yang teratur.

Menurut Koentjaraningrat, (2002: 11) adat adalah wujud ideal dari suatu kebudayaan, karena adat sebagai pengatur tata kelakuan. Adat juga dapat dibagi dalam 4 tingkatan yakni tingkatan nilai budaya, tingkatan norma-norma, tingkat

hukum dan tingkat aturan khusus yang mengatur aktifitas – aktifitas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam pergaulan ini sikap dan tingkah laku tersebut menjadi suatu kebiasaan. Dari kebiasaan tersebut dapat dikatakan suatu cara yang disebut adat.

Abdul Haris Asy'arie (2005:84) mengemukakan bahwa kepala adat adalah seseorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak saat bertindak menjadi penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam membuat suatu keputusan. Kedudukan kepala adat sangat strategis, karena kepala adat menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat yang merupakan penyelenggara tanggung jawab dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Winardi dalam Patton (2005) pemimpin informal adalah seorang atau sekelompok orang yang karena latar belakang pribadinya sangat kuat mewarnai dirinya (diri mereka) memiliki kualitas subjektif ataupun objektif yang memungkinkannya tampil dalam kedudukan di luar struktur organisasi resmi namun ia dapat mempengaruhi kelakuan atau tindakan suatu kelompok masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif.

Kepala adat berperan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yaitu dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat sesuai dengan aturan adat istiadat yang berlaku, dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat.

3. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu yang ingin dicapai semua kalangan baik itu masyarakat maupun pemerintah, pembangunan juga merupakan sesuatu daya upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dari yang buruk menjadi lebih baik. Dengan mendaya gunakan segala sumber daya yang ada pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Binoro Tjokroamidjojo dalam Lambang (2007), mengemukakan pengertian pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Menurut Saul M. Katz yang dikutip oleh Teguh Yuwono (2001:4) mengatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai.

Tujuan Pembangunan

Pembangunan bertujuan untuk kebaikan masyarakat yang memiliki hakikat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khairuddin (2002:29), menyatakan pada umumnya, Komponen dari cita-cita akhir dari Negara modern di dunia baik yang sudah maju ataupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya "titik

jenuh” yang absolute yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan bagi seperti:

- a. Keadilan social
- b. Kemakmuran yang merata
- c. Perlakuan sama dimata hokum
- d. Kebahagiaan mental, spiritual dan material
- e. Kebahagiaan untuk semua
- f. Ketentraman dan keamanan

4. Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan kebutuhan manusia secara kodrat, karena kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan yang melekat pada diri manusia, disatu sisi memerlukan pemimpin dan disisi lain pada saat tertentu dituntut untuk mampu memimpin. Masalah kepemimpinan muncul bersamaan dengan peradaban manusia. Dan ada anggapan bahwa maju atau mundurnya suatu organisasi, maka sangat bergantung kepada bagaimana pemimpinnya berperilaku. Secara umum banyak sekali pendekatan tentang teori kepemimpinan yang muncul pada abad kedua puuh dan abad kedua puluh satu. Pendekatan ini meliputi kepemimpinan sifat, kepemimpinan prilaku, kepemimpinan kekuasaan/pengaruh kepemimpinan situasional, kepemimpinan integrative.

Definisi tentang kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Menurut Rivai (2009 : 2) : Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi

interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian, dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang luar kelompok atau organisasi.

Adapun pengertian kepemimpinan menurut Wahjosumidjo (2005 : 25) :
“Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi didalam situasi tertentu”. Dengan demikian pada dasarnya bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses kegiatan untuk mempengaruhi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Menurut Rivai (2009:2) ada beberapa factor yang dapat menggerakkan orang, yaitu ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan.

Dalam menjelaskan konsep kepemimpinan menurut Sudriamunawar (2006:2) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah :

1. Kekuasaan yaitu kewenangan untuk bertindak bagi seorang pemimpin untuk menggerakkan bawahannya agar mau dengan senang hati mengikuti kehendaknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kewibawaan yaitu berbagai keunggulan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin sehingga membedakan dengan yang dipimpinnya, dengan

keunggulan tersebut membuat orang lain patuh dan bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang dikehendaknya.

3. Kemampuan, yaitu keseluruhan daya tarik berupa keterampilan sosial maupun ketrampilan teknis yang melebihi orang lain.

Sementara itu Koontz (dalam Silalahi 2002:185) memiliki pendapat bahwa kepemimpinan muncul dalam ilmu pengetahuan sosial dengan tiga arti utama, yaitu :

1. Atribut suatu posisi (the attribute of a position), arti yang pertama, yaitu kepemimpinan sebagai suatu posisi, menunjuk kepada kekuasaan dan wewenang yang berada pada posisi tertentu. Hanya mereka memiliki kekuasaan dan wewenang saja bias disebut pemimpin.
2. Sifat seseorang (the characteristic of a person), arti yang kedua, yaitu kepemimpinan sebagai sifat seseorang, menunjuk kepada kecakapan seseorang untuk memahami bahwa manusia memiliki kekuatan yang memotivasi.
3. arti yang ketiga, yaitu kepemimpinan merupakan interaksi antara pemimpin dengan pengikut dan dalam interaksi tersebut pengikutlah yang menganalisis dan mempersepsikan perilaku pemimpin, apakah menerima pengaruh dari pemimpinnya.

Pemimpin bukanlah seorang kepala yang didasarkan pada pengangkatan formal dengan melalui mekanisme dan struktur yang telah ditetapkan. Perbedaan ini antara lain dikemukakan oleh Pamudji (2002:63) yang mengemukakan :

1. Seorang kepala diangkat oleh kekuasaan instansi tertentu, biasanya dengan satu surat keputusan dan telah diatur pada tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, sedangkan seorang pemimpin yang dipilih oleh pengikut atau diangkat oleh sesuatu kekuasaan akan tetapi disertai penerimaan baik dan pengakuan oleh masyarakat.
2. Seorang kepala lebih mengandalkan kekuasaan yang berasal dari atau berdasarkan pada kekuatan peraturan-peraturan serta kekuasaan atasannya, sedangkan seorang pemimpin lebih mengandal kewibawaan yang berlandaskan pada kepercayaan para pengikut terhadapnya.
3. Seorang kepala bertindak sebagai penguasa, sedangkan seorang pemimpin berperan sebagai pencetus ide-ide organisasi, penggerak, pengarah dan koordinator.
4. Seorang kepala bertanggung jawab terhadap atasannya dan pihak ketiga akan tetapi tidak bertanggung jawab terhadap anak buahnya, sedangkan seorang pemimpin selain bertanggung jawab terhadap atasannya dan pihak ketiga harus bertanggung jawab pula terhadap pengikutnya.
5. Seorang kepala senantiasa merupakan bagian dari suatu organisasi di samping anak buahnya, sedangkan seorang pemimpin adalah bagian dari pengikut atau anak buahnya yang menerima baik dan mengakuinya.

Disisi lain, kepemimpinan merupakan suatu proses kegiatan atau aktifitas dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut melalui kegiatan menggerakkan orang-orang yang dipimpin. Dalam kaitan ini, Kartono (2001 :33) berpendapat bahwa :

“Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kekurangan dan kelebihan disuatu bidang tertentu, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi tingkah laku orang-orang supaya dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang disepakati bersama. Atau kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang terorganisasi supaya mau bekerja sama dengan pimpinan dalam suatu situasi tertentu untuk mencapai tujuan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan hubungan pengaruh dari pemimpin terhadap para pengikutnya dengan memberikan misi, visi, perhatian, rasa senang, kasih sayang, kepercayaan, obsesi, dan konsistensi pada para anggota organisasi serta menggunakan symbol-simbol, perhatian, memberikan pelatihan, serta menunjukkan contoh dan tindakan nyata serta memotivasi para pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi secara sukarela.

Lebih jauh, menurut Rivai (2009:3), kepemimpinan pada hakikatnya adalah :

1. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi
2. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam pencapaian tujuan bersama.

3. Kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan
4. Melibatkan tiga hal, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu
5. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan.

Sumber pengaruh dapat secara formal atau tidak formal. Pengaruh formal ada bila seseorang pemimpin memiliki posisi manajerial di dalam sebuah organisasi. Sedangkan sumber pengaruh tidak formal muncul diluar struktur organisasi formal.

kepemimpinan pelayanan menyiratkan para pemimpin sebenarnya adalah memimpin orang lain, karyawan dan masyarakat. Karakteristik dari seseorang pemimpin pelayanan meliputi : mendengarkan, empati, menyembuhkan, kesadaran, persuasi, konseptual, memandang ke depan, tanggung jawab, komitmen terhadap pertumbuhan orang lain, dan memberdayakan masyarakat.

Seringkali ada kebingungan istilah “pemimpin” dan “pimpinan”. Pemimpin (leader) adalah orang yang melakukan/menjalankan kepemimpinan (leadership) sedangkan kata pimpinan mencerminkan kedudukan seseorang atau sekelompok orang pada hierarki tertentu dalam suatu organisasi, yang mempunyai bawahan yang karena kedudukannya yang bersangkutan mendapatkan kekuasaan formal (wewenang, authority) dan tanggung jawab. Dalam konteks organisasi, selain menjadi pimpinan, seseorang diharapkan juga mampu menjadi pemimpin dengan kata lain, diharapkan menjadi seorang manajer sekaligus menjadi pemimpin.

Kepemimpinan (leadership) memang memiliki seni yang tiada batasnya, mencakup berbagai aspek dimensi yang selalu menarik untuk dipelajari. Menurut

covey (2005:169) bahwa : “bukan kepemimpinan sebagai sebuah posisi atau kedudukan, melainkan kepemimpinan sebagai sebuah upaya proaktif untuk memperkuat nilai-nilai sejati dan potensi dari orang-orang di sekitar kita, maupun untuk mempersatukan mereka sebagai sebuah tim yang saling melengkapi dalam ikhtiar untuk meningkatkan pengaruh dan kelompok dari organisasi dan tujuan-tujuan penting yang kita upayakan”.

Dalam sebuah tim yang saling melengkapi sebagaimana dikemukakan oleh Covey diatas, kekuatan individual menjadi produktif dan kelemahan mereka tidak menjadi hambatan, karena halhal tersebut telah ditutupi oleh kekuatan orang lain. Dengan demikian, kepemimpinan dapat mendorong kelebihan-kelebihan yang dipimpinya menjadi suatu kekuatan strategis dan kelemahan-kelemahan orang dalam organisasi tersebut dapat saling tertutupi. Lebih jauh Covey (dalam Rivai 2003:156) membagi peran kepemimpinan menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Pathfinding* (pencarian alur) : peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
2. *Aligning* (penyelaras) : peran untuk memastikan bahwa struktur, system dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
3. *Empowering* (pemberdaya) : peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati

Kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen didalam kehidupan organisasi memiliki peran strategis dan merupakan gejala sosial yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat karena memiliki kedudukan strategis sebagai titik sentral dan dinamistator bagi seluruh proses kegiatan organisasi. Dengan demikian berarti aspek kepemimpinan sangat berperan dan menentukan dalam proses dinamika dari berbagai sumber yang ada baik dalam organisasi itu sendiri maupun dalam aspek diluar organisasi. Dilihat dari posisinya yang strategis, maka kepemimpinan sangat mutlak diperlukan dimana terjadi interaksi yang sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pemikiran dan pengamatan tersebut maka konteks kepemimpinan diartikan pula sebagai gejala sosial dan sangat diperlukan dalam kehidupan kelompok dalam masyarakat, karena kepemimpinan akan terlihat apabila apa yang dilakukan pemimpin mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kiranya tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan buat organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat bergantung kepada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Bahkan kiranya dapat diterima sebagai suatu “truism” apabila dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan.

Kepemimpinan merupakan unsur yang penting dalam organisasi, karena menyangkut hubungan antara pimpinan dengan anggota kelompok tersebut, dalam

hal ini masyarakat. Komponen dari kepemimpinan merupakan suatu proses untuk mempengaruhi bawahannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Bagaimana bawahan menyelesaikan tugas yang diinginkan oleh pemimpin.

Dalam organisasi terdapat dua pihak yang saling tergantung dan merupakan unsur utama dalam suatu organisasi yaitu keberadaan pimpinan sebagai atasan dan pengikut sebagai bawahan. Kedua belah pihak saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Untuk itulah perlu ada penilaian terhadap kinerja bawahan dan bawahan mempunyai penilaian terhadap atasannya, apakah pimpinannya merupakan pribadi yang dapat dicontoh sebagai teladan, atau orang yang mampu memberikan motivasi kepada pengikut untuk bekerja lebih baik, mampu mengembangkan pengikutnya sesuai dengan kemampuannya.

Permasalahan kesejahteraan sosial pada realita kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan dilihat dari jenis dan jumlahnya bisa dikatakan cukup kompleks. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut mulai dari yang konvensional sampai dengan yang sifatnya kekinian. Sifatnya konvensional bisa dikatakan antara lain kemiskinan, ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, dan yang lainnya. Sedangkan masalah sosial yang sifatnya kekinian bisa dikatakan antara lain kekerasan dalam rumah tangga, miras, narkoba, AIDS/ HIV, korban bencana alam/sosial, dan yang lainnya. Penanganan permasalahan sosial pada level komunitas lokal biasanya sudah dilakukan, baik oleh aparat desa itu sendiri maupun para tokoh masyarakat dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya, penanganan yang dilakukan tersebut pada umumnya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal itu

disebabkan oleh berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain sumber daya manusianya yang masih kurang memadai, baik jumlah maupun kemampuannya, sumber dana, cara atau teknik penanganannya, dan lain sebagainya. Pada kenyataan di lapangan itu semua sangat berkaitan erat dengan tersedianya potensi maupun sumber untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan sosial yang ada.

Pada saat usaha penggalian potensi maupun sumber yang terdapat di masyarakat biasanya diperlukan berbagai unsur yang terangkum dalam modal sosial (*social capital*). Terkait dengan modal sosial, Eva Cox (2005) dalam Hasbullah (2006) mendefinisikannya sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Sedangkan Paul Ballen dan Jenny Onix (2008) dalam Hasbullah (2006) menambahkan bobot terhadap dimensi modal sosial yang sangat penting yakni “kemampuannya sebagai basis sosial” untuk membangun masyarakat sipil yang sebenarnya. Sedangkan Hasbullah (2006) sendiri mengatakan bahwa, modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Pakar lainnya seperti Harrison (2000) mengartikan, bahwa *social capital* sebagai seperangkat rangkaian nilai-nilai internal atau norma-norma yang disebarkan di antara anggota-anggota suatu kelompok yang mengizinkan mereka untuk

bekerjasama antara satu dengan yang lain. Lebih jauh dikatakan, bahwa prasyarat penting untuk munculnya *social capital* adalah adanya kepercayaan (*trust*), kejujuran (*honesty*), dan hubungan timbal balik (*reciprocity*). Sementara itu Serageldin dan Grosstaer (2009) mendefinisikan *social capital* sebagai seperangkat cara, jalinan kerja, dan organisasi yang dapat meningkatkan akses manusia terhadap akses kekuasaan dan sumber penting yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan dan memformulasikan kebijakan.

JH Turner (2011) mengatakan, bahwa *social capital* lebih menekankan pada hubungan sosial dan pola-pola organisasi sosial yang diciptakan untuk memperoleh kekuatan yang potensial untuk perkembangan ekonomi. Ia juga mengaitkan *social capital* dengan analisis mikro, mezzo, dan makro sehingga *social capital* tidak bisa dijelaskan dengan istilah modal (investasi) sebagaimana yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari atau pada tataran dunia usaha. Kenneth (2012) menambahkan, bahwa beberapa persyaratan dalam *social capital* adalah a) *Trust one another*; b) *Sharing the right values*; dan c) *Truth telling, meeting obligations and reciprocity*. Sedangkan menurut Woolcock, et al (2000) mengatakan, bahwa *social capital* lebih merujuk pada norma-norma dan jaringan yang memungkinkan orang – orang untuk bertindak secara kolektif. Jika mencermati beberapa definisi dari berbagai ahli di atas mengenai *social capital*, pada dasarnya di dalamnya mencakup beberapa hal seperti adanya unsur kepercayaan (*trust*), norma atau nilai yang harus disepakati setiap anggotanya, hubungan timbal balik (*reciprocity*), cara, organisasi, dan jalinan kerja.

a. Peranan Tokoh Masyarakat Lokal dalam Pembangunan

1) Partisipasi Tokoh Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation dan kata kerjanya participate artinya peran serta yakni ikut mengambil bagian. Menurut Dusseldorp (2012:167) bahwa partisipasi adalah suatu bentuk interaksi dan komunikasi khas yaitu berbagai di dalam tanggung-jawab dan kekuasaan, lebih jauh lagi dikatakan bahwa semakin luas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, semakin tinggi tingkat keberhasilan pembangunan.

Jenis-jenis dan tahap partisipasi masyarakat adalah (1) partisipasi pikiran (psychological participation), (2) partisipasi tenaga (physical participation), (3) partisipasi pikiran dan tenaga (psychologica and physical participation) (4) partisipasi keahlian (participation with skill). (5) partisipasi barang (material participation), (6) partisipasi uang (money participation). (Davis, 2010:16)

Kegiatan partisipasi tokoh masyarakat dalam pembangunan merupakan langkah-langkah atau tahapan keikutsertaannya dalam proses pembangunan. Tahap partisipasi masyarakat tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan/perencanaan,
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan,
4. Partisipasi dalam evaluasi pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan baik di tingkat perkotaan maupun perdesaan pada dasarnya harus melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Apalagi dalam pembangunan bidang yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat

seperti pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilakukan pada komunitas atau masyarakat. Pada pelaksanaan pembangunan tersebut, tokoh masyarakat lokal memegang peranan yang sangat penting. Berkaitan dengan itu menurut Resti, bahwa “dalam pelaksanaan program pembangunan membutuhkan penanganan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Untuk dapat mensukseskan program pembangunan selain dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat juga dibutuhkan pemimpin yang bersedia tampil dalam setiap pembangunan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap pelopor, berani, memberikan contoh dan teladan yang baik serta rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan pedesaan ditentukan oleh beberapa hal diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dan kemampuan serta keterampilan pemimpin – pemimpin nya di dalam menggerakkan semangat pembangunan. Kondisi masyarakat yang keanekaragaman adat istiadat dan norma - norma sosial memberikan corak yang berbeda dalam bentuk organisasi tata pemerintahan desa. Keanekaragaman ini mengakibatkan munculnya tokoh-tokoh kepemimpinan yang kompleks. Selain terdapat pemimpin formal (Kepala Desa) terdapat juga para tokoh pemimpin informal yang keberadaannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Pemimpin formal dan informal memberikan pengaruh terhadap program pembangunan, sehingga untuk dapat melaksanakan program pembangunan diperlukan kerjasama antara tokoh pemimpin formal maupun informal”, dalam masyarakat lokal.

Menurut Narotama dalam Kartodirdjo(2006), menyebutkan bahwa dalam setiap masyarakat secara wajar timbullah dua kelompok yang berbeda peranan sosialnya,yaitu yang memimpin sebagai golongan kecil yang terpilih dan kelompok yang dipimpin,ialah orang kebanyakan. Kartodirdjo juga menjelaskan bahwa akibat adanya interaksi antara orang dengan kepribadian yang kuat dengan faktor situasional akan menghasilkan pemimpin.

Hal ini oleh Kartodirdjo disebut sebagai teori kepribadian dalam situasi. Lebih rinci lagi ialah bahwa kepemimpinan adalah pertemuan antara pelbagai faktor; 1) Sifat dan golongannya, 2) Kepribadian, dan 3) Situasi atau Kejadian. Terkait penjelasan tersebut Narotama dalam Wiriadihardja (2008) menyebutkan, bahwa yang dimaksud sebagai pemimpin (*Leader*) adalah seorang yang dengan cara apapun, mampu mempengaruhi pihak orang lain untuk berbuat sesuatu, sesuai dengan kehendak orang itu sehingga tujuan yang telah ditentukan tercapai. Tidak jauh berbeda, pemimpin juga didefinisikan sebagai pengaruh antar personal yang dilaksanakan dalam suatu keadaan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan khusus, melalui proses komunikasi. Lebih lanjut Narotama dalam Etzioni (2005) menjelaskan, bahwa pemimpin dapat dibagi menjadi dua yaitu formal dan informal.

Etzioni menambahkan bahwa yang dimaksud dengan pemimpin informal adalah seorang individu yang mampu mengendalikan bawahan berdasarkan kekuatan pribadinya. Sedangkan seorang yang sekaligus memiliki kekuasaan posisional dan kekuatan pribadi disebut pimpinan formal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan pemimpin adalah seseorang yang memiliki tujuan dan dapat mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemimpin lokal dalam penelitian ini adalah individu yang mempunyai tujuan atau maksud yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan yang mempengaruhi atau memotivasi masyarakat sekitarnya. Besarnya pengaruh dari tindakan tersebut dipengaruhi oleh modal yang dimiliki oleh pemimpin lokal. Peranan tokoh masyarakat atau pemimpin lokal dalam pembangunan salah satunya adalah dengan melihat partisipasi pemimpin lokal tersebut dalam program pembangunan.

Mengaitkan dengan teori tersebut Narotama dalam Cohen dan Uphoff (2009) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan kegiatan, tahapan tersebut yaitu sebagai berikut; 1) Tahap pengambilan keputusan, diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini adalah proses perencanaan suatu kegiatan; 2) Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya.

Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek; 3) Tahap menikmati hasil, yang menjadi indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek yang dirasakan, berarti

proyek tersebut berhasil mengenai sasaran; 4) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar meningkatkan kesejahteraan manusia dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang di pandang lebih bernilai, komunikasi pembangunan merupakan proses interaksi seluruh warga masyarakat (aparap pemerintah, penyuluh, tokoh masyarakat, LSM, individu atau kelompok/organisasi sosial) untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi melalui proses perubahan terencana demi tercapainya mutu-hidup secara berkesinambungan, dengan menggunakan teknologi atau menerapkan ide-ide yang sudah terpilih.

Pada dasarnya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial memerlukan berbagai cara, baik itu pikiran, tenaga, dana, metode, maupun alat bantu lainnya. Padatataran inilah harus muncul tokoh-tokoh lokal tertentu dalam melaksanakan perannya untuk merespon dan menangani masalah kesejahteraan sosial yang muncul di wilayahnya. Tokoh-tokoh lokal tersebut dapat memotivasi warga masyarakat melalui peranannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Bintarto, dkk (2008:23) mengatakan pembangunan merupakan upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik. Pembangunan adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang

lebih baik, perubahan sosial tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan berlangsung secara terus menerus, Katz (2005:30).

Tahap-tahap partisipasi tokoh masyarakat dalam pembangunan desa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan : perencanaan merupakan awal proses partisipasi terlibat untuk menentukan program-program apakah yang akan dibangun. Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Pelaksanaan Pembangunan; tahap pelaksanaan pembangunan merupakan implementasi dari program-program yang telah disetujui atau diputuskan dalam tahap pengambilan keputusan. Pelaksanaan diartikan keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan tersebut. (Davis,2010:45). Tahap pelaksanaan ini dapat berupa keikutsertaan secara fisik seperti pemberian tenaga maupun pemberian sumbangan dan bahan-bahan material untuk pembangunan.
3. Pemanfaatan Hasil Pembangunan; tahap pemanfaatan hasil yakni tahap dimana masyarakat memperoleh hasil-hasil dari program pembangunan yang telah dilaksanakan. Tahap penerimaan hasil ini merupakan perwujudan dalam partisipasi. Pemanfaatan merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, karena apabila hasil dari pembangunan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka pelaksanaan pembangunan tidak dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama.

4. Evaluasi Keberhasilan Pembangunan; evaluasi merupakan hal yang sangat penting dari setiap pelaksanaan pembangunan yakni proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi kualitas kinerja program/kegiatan. Menurut Siagian (2010:48-70) terdapat lima peran pemimpin, yaitu :

- a. Penentu arah, yaitu pemimpin menentukan arah tujuan organisasi dalam pengambilan keputusan dan pemimpin merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang dilakukan secara terencana dan bertahap.
- b. Wakil dan juru bicara organisasi, yaitu pemimpin berperan sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam menjalin komunikasi dengan pihak atau instansi lain.
- c. Komunikator, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan berbagai sasaran, strategi, tindakan atau keputusan yang diambil baik secara lisan maupun tertulis untuk disampaikan kepada para pelaksana kegiatan operasional atau bawahan melalui jalur komunikasi yang terdapat dalam organisasi
- d. Mediator, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam menyelesaikan situasi konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi, maupun lingkungannya tanpa mengurangi pentingnya situasi konflik yang mungkin timbul dalam hubungan keluar yang dihadapi maupun yang diatasi.

- e. Integrator, yaitu pemimpin yang berfungsi sebagai penyatu dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda pola pikir menuju pada tujuan bersama.

b. Pengertian Peran Kepemimpinan

Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen organisasi. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan - keterbatasan tertentu pada diri manusia. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Kepemimpinan didefinisikan ke dalam ciri-ciri individual, kebiasaan, cara mempengaruhi orang lain, interaksi, kedudukan dalam organisasi dan persepsi mengenai pengaruh yang sah. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias (David, Keith, 2005). Menurut Veitzhal Rivai (2004), kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi pikiran, perasaan, tindakan dan tingkah laku orang lain untuk digerakkan ke arah tujuan tertentu. Kepemimpinan memainkan peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini

sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom (2005) yang menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan. Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, ketrampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu (Heidjrachman dan Husnan, 2003), sedangkan menurut Tjiptono (2011) gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey, 2004).

Berdasarkan pengertian gaya kepemimpinan menurut pakar diatas, maka dapat disimpulkan gaya kepemimpinan adalah (*leadership styles*) merupakan cara yang diambil seseorang dalam rangka mempraktekkan kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan bukan suatu bakat, sehingga dapat dipelajari dan dipraktekkan dan dalam penerapannya harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Gaya kepemimpinan merupakan perilaku pimpinan terhadap pengikutnya, atau cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya

c. Konsep Perilaku Kepemimpinan

Perilaku kepemimpinan adalah perilaku khusus/pribadi para pemimpin terkait dengan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin. Perilaku kepemimpinan dipahami sebagai suatu kepribadian (*personality*) seorang

pemimpin yang diwujudkan dalam aktivitas kepemimpinannya dalam kaitannya dengan mengelola tugas dan hubungan dengan bawahan/pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku seorang pemimpin terkait erat dengan beberapa hal, yaitu kemampuan yang dimilikinya, karakter setiap bawahan yang dipimpinnya, jabatan atau posisi tertentu yang diembannya, dan budaya organisasi serta situasi kondisi yang menyertainya. Teori tentang perilaku kepemimpinan perlu diungkap mengingat seorang pemimpin harus mengetahui tingkat kematangan para pegawainya agar bisa memimpin mereka secara efektif. Banyak pemimpin yang gagal karena tidak mengetahui dengan baik karakter dan kebutuhan pegawainya dalam melakukan pekerjaan.

d. Macam-Macam Gaya Kepemimpinan

Blanchard K.H. (2006) membagi empat gaya kepemimpinan yaitu:

1) Gaya konsultatif

Gaya konsultasi dicirikan oleh adanya pemimpin yang membatasi peranannya dan menginstruksikan bawahan tentang apa, bagaimana, bilamana, di mana harus melakukan suatu tugas tertentu.

2) Gaya partisipatif

Gaya partisipasi dicirikan oleh adanya pemimpin dan bawahan yang saling tukar menukar ide dalam pembuatan keputusan melalui komunikasi dua arah, dan yang dipimpin cukup mampu serta berpengetahuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada bawahan.

3) Gaya delegatif

Gaya delegatif dicirikan oleh adanya pemimpin yang banyak melibatkan bawahan untuk melaksanakan tugas sendiri melalui pendelegasian dan supervisi yang bersifat umum.

4) Gaya instruktif.

Gaya instruktif diicirikan pimpinan masih banyak memberikan pengarahan dan memberikan dukungan dalam keputusan melalui komunikasi dua arah.

Lebih lanjut berdasarkan pendapat Hasibuan (2006) gaya kepemimpinan dibedakan menjadi dua aspek.

1. Gaya kepemimpinan berkaitan dengan hasil kerja dengan ciri-ciri memberi *reward* atas prestasi kerja karyawan, kebijakan pimpinan yang berpihak, adanya evaluasi terhadap hasil kerja karyawan.
2. Gaya kepemimpinan berkaitan dengan karyawan dengan ciri-ciri memiliki sikap empati kepada karyawan, pimpinan bersikap merespon jika bawahan menyampaikan keluhan, pimpinan memperhatikan kegiatan karyawan, pimpinan memberi instruksi kepada bawahan mengenai tugas yang diberikan kepada pegawai, memberi peran kepada pegawai dalam memecahkan masalah, pengambil keputusan tidak hanya ditangan pimpinan saja, serta pimpinan melibatkan pegawai dalam mengambil keputusan.

Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif pula, untuk itu pemimpin harus betul-betul dapat menjalankan

fungsinya sebagai seorang pemimpin dengan cara menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik bawahan.

e. Peran Kepemimpinan yang Efektif

Menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Sondang P Siagian (2005) adalah

1. Pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, obyektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan.
2. Sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi, keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik.
3. Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan skala prioritas, membedakan yang urgen dan yang penting, keterampilan mendidik, dan berkomunikasi secara efektif. Komunikasi dalam proses kepemimpinan merupakan suatu hal yang vital dalam suatu organisasi, karena komunikasi diperlukan untuk mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik serta proses-proses organisasi lainnya.

f. Tipologi Kepemimpinan

Dalam praktiknya, dari beberapa gaya kepemimpinan tersebut berkembang beberapa tipe kepemimpinan di antaranya adalah sebagian berikut (Siagian, 2007):

1) Tipe Otokratis

Seorang pemimpin yang otokratis ialah pemimpin yang memiliki kriteria atau ciri sebagai berikut:

- Menganggap organisasi sebagai milik pribadi;
- Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi; menganggap bawahan sebagai alat semata-mata;
- Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat;
- Terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya;
- Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum.

2) Tipe Militeristis

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang pemimpin tipe militerisme berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat berikut :

- Dalam menggerakkan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan;
- Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya;
- Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan;
- Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan;
- Sukar menerima kritikan dari bawahannya;
- Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

3) Tipe Paternalistis

Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paternalistis ialah seorang yang memiliki ciri sebagai berikut :

- Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa; bersikap terlalu melindungi (*overly protective*);
- Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan;
- Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif;
- Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya;
- Sering bersikap maha tahu.

4) Tipe Karismatik

Hingga sekarang ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab sebab mengapa seseorang pemimpin memiliki karisma. Umumnya diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya yang sangat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Karena kurangnya pengetahuan tentang sebab musabab seseorang menjadi pemimpin yang karismatik, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (*supra natural powers*). Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma.

5) Tipe Demokratis

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern. Hal ini terjadi karena tipe kepemimpinan ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia;
- Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari pada bawahannya;
- Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya;
- Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan *teamwork* dalam usaha mencapai tujuan;
- Ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain;
- Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya;
- Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Secara implisit tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin tipe demokratis bukanlah hal yang mudah. Namun, karena pemimpin yang demikian adalah yang paling ideal, alangkah baiknya jika semua pemimpin berusaha menjadi seorang pemimpin yang demokratis.

Ishak Arep, Hendri Tanjung, (2003) mengemukakan empat (4) gaya kepemimpinan yang lazim digunakan, antara lain :

1. *Democratic leadership*, yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan.
2. *Directorial / Authocratic Leadership*, yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut untuk kepentingan pribadi dan golongannya dengan kesediaan menerima segala resiko apapun.
3. *Paternalitic Ledership*, yakni bentuk gaya kepemimpinan pertama (*democratic*) dan kedua (*dictorial*) diatas, yang dapat diibaratkan dengan sistem diktator yang berselimutkan demokratis.
4. *Free Rein Ledership*, yakni gaya kempimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan pengoprasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditentukan oleh atasan mereka.

Menurut Heidjrachman dan Husnan (2002:173) seorang pemimpin harus memiliki sifat *perceptive* artinya mampu mengamati dan menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Untuk itu ia harus mampu melihat, mengamati, dan memahami keadaan atau situasi tempat kerjanya, dalam artian bagaimana para bawahannya, bagaimana keadaan organisasinya, bagaimana situasi penugasannya, dan juga tentang kemampuan dirinya sendiri. Ia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu dalam memilih gaya kepemimpinan yang akan digunakan, perlu dipertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

g. Strategi Komunikasi

Menurut Harold D. Laswell "komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2000 : 10)" . Paradigma Laswell menyatakan: who, sayswhat,in which channel, to whom with, what efeect (siapa, mengatakan apa,melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa) hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur yaitu:

1. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan
2. Pesan (message), yaitu pernyataan yang didukung oleh lambang, ide, opini,informasi dan lain sebagainya
3. Komunikan (communicant, audience), yaitu orang yang menerima pesan
4. Saluran (media, channel), yaitu alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan
5. Efek (effect) yaitu efek atau pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan (Effendy, 2000 : 6)

Ada berbagai definisi strategi komunikasi, menurut Effendy (2007:32) yang menyatakan bahwa "strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai sebuah tujuan.Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidaklah berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasional.

Komunikasi dalam pengertian paradigmatik bersifat intensional, mengandung tujuan; karena itu harus dilakukan dengan perencanaan. Sejuahmana

kadar perencanaan itu, bergantung kepada pesan yang akan dikomunikasikan dan pada komunikan yang dijadikan sasaran. (Effendy, 2000:5).

Pada bagian lain juga dinyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih maju keadaan sebelumnya.

h. Pentingnya Strategi Komunikasi

Para ahli komunikasi, terutama di Negara-negara yang sedang berkembang, dalam tahun-tahun terakhir ini menumpahkan perhatiannya yang besar terhadap strategi komunikasi (*Communication strategi*), dalam hubungan dengannya dalam pergantian pembangunan nasional dinegara masing-masing. Fokus perhatian ahli komunikasi ini memang penting untuk ditujukan kepada strategi komunikasi, karena berhasilnya tidak kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. Strategi komunikasi baik secara makro (*planned multi-media strategi*) mempunyai fungsi ganda :

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasife dan intruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal.
2. Menjembatani "*cultural gap*" akibat kemudahan dioprasionalkannya media masa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. Strategi pada akhirnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi komunikas imerupakan panduan perencanaan

komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan (Effendy, 2004: 32). Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bias berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

Sesuai dengan pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa strategi komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir oleh sebuah organisasi.

i. Tujuan Strategi Komunikasi

Tujuan sentral strategi komunikasi dikemukakan oleh Pace, Peterson, dan Burnett (Anggraini, 2009:11) sebagai berikut :

1. *To Secure Understanding*, untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi.
2. *To Establish Acceptance*, bagaimana cara penerima itu diterima dengan baik.
3. *To Motive Action*, penggiatan untuk memotivasinya.
4. *The Goals Which the Communication Sought To Active*, bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut.

B. Kerangka Konsep Penelitian

Dalam Pengembangan pembangunan di kecamatan Aimere, Penulis membuat kerangka perbandingan tentang ada atau tidaknya Peran Kepemimpinan tokoh adat etnis bajawa terhadap Pembangunan di kecamatan Aimere kabupaten

Ngada, NTT beserta faktor – faktor yang menghambat. Untuk itu kerangka berpikir dapat divisualisasikan dalam bagan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe studi kasus (case studies) yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena social tertentu sebagaimana adanya. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang sumbernya diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data ini diperoleh dari sumber bacaan dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

C. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kolektor Kecamatan	1 Orang
2. Kepala Desa	1 Orang
3. Tokoh adat	9 Orang
4. Masyarakat	11Orang
Jumlah	22 Orang

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan tokoh adat etnis bajawa dan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan daerah di Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, Propinsi NTT.
2. Wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan para tokoh adat setempat dan masyarakat kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, Propinsi NTT.
3. Studi Dokumentasi yaitu peneliti melakukan kajian terhadap bahan – bahan tertulis yang menjadi dokumen dan tersimpan dalam sistem kearsipan pada pemerintah Kecamatan Aimere Kabupaten ngada Propinsi NTT.

E. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah tahap selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh , dikerja dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang

diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012 : 91), terdapat 3 aktivitas dalam analisis data, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data berarti berarti merangkum, memilih hal –hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal – hal yang ditemui dengan mencatat peraturan – peraturan, sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Keabsahan Data

Setelah menganalisis data , peneliti harus memastikan apakah interpretasi dan temuan penelitian akurat. Validasi temuan menurut Creswell (Sugiyono, 2012 : 42) berarti bahwa peneliti menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui beberapa strategi, antara lain member checking, Triangulasi, dan External Audit.

1. Member Checking adalah proses peneliti mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan untuk tujuan seperti yang telah dijelaskan di atas. Aktivitas ini juga dilakukan untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada mereka baik lisan maupun tertulis tentang keakuratan laporan penelitian tersebut, misalnya apakah deskripsi data telah lengkap, apakah interpretasi bersifat representatif dan dilakukan tanpa kecenderungan.
2. Triangulasi merupakan proses penyokongan bukti terhadap temuan, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti yang berasal dari: 1) Individu (informan) yang berbeda. 2) tipe atau sumber data (wawancara, pengamatan, dan dokumen). Serta 3) metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan, dan dokumen)
3. External Audit, yaitu untuk menghindari bias atas hasil temuan penelitian, peneliti perlu melakukan cek silang dengan seseorang di luar penelitian. Seseorang tersebut dapat berupa pakar yang dapat memberikan penilaianimbang dalam bentuk pemeriksaan laporan penelitian yang akurat.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data

1. Gambaran umum kecamatan Aimere

Wilayah Kecamatan Aimere yang sekarang, pada awal sebelum menjadi sebuah Kecamatan adalah merupakan wilayah - wilayah hamente yakni Hamente Inerie I, Hamente Inerie II dan Hamente Kombos dengan jangkauan wilayah antara lain:

- a. Hamente Inerie I mencakup wilayah Jerebu'u (termasuk Desa Manubhara, Legeriwu dan Tiwu Rana yang sekarang masuk dalam Kecamatan Inerie)
- b. Hamente Inerie II mencakup wilayah saat ini yakni Waebela, Kelitey, Warupele I Warupele II, Inerie, Sebowuli Paupaga, Kila, Binawali dan Kelurahan Foa;
- c. Hamente Kombos mencakup Wilayah saat ini yakni Lekogoko, Aimere Timur, Kelurahan Aimere, Waesae, Legelapu, Keligejo dan Heawea.

Pada Awal Pembentukan Kabupaten Ngada wilayah Kecamatan Aimere merupakan bagian dari kecamatan Ngada selatan yang saat itu mencakup wilayah Kecamatan Aimere (Aimere, Inerie dan Jerebu'u) dan Kecamatan Golewa (Golewa Selatan, Golewa dan Golewa Barat). Sejalan dengan pembentukan desa baru di Kabupaten Ngada, Kecamatan Ngada Selatan di bagi menjadi dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Golewa dan Kecamatan Aimere dengan cakupan wilayahnya adalah Aimere, Inerie dan Jerebu'u.

2. Pemekaran Wilayah

Pada Tahun 2002 terjadi pemekaran Kecamatan Aimere menjadi Dua Kecamatan Yakni Jerebu'u dengan cakupan wilayah Desa adalah Nenowea, Naruwolo, Dariwali, Tiworiwu dan Watumanu dan Kecamatan Aimere dengan cakupan wilayah Desanya : Kelitey, Warupele I, Warupele II, Inerie, Sebowuli, Kelurahan Foa, Aimere Timur, Kelurahan Aimere dan Keligejo.

Hasil aspirasi masyarakat Kecamatan Aimere dan Kecamatan Jerebu'u serta inisiatif dari anggota DPRD Kabupaten Ngada daerah pemilihan Aimere – Jerebuu pada bulan Mei 2012 telah menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kecamatan baru hasil pemekaran kecamatan Aimere dan Kecamatan Jerebuu. Hasil kesepakatan tersebut telah diusulkan kepada pemerintah untuk melakukan kajian teknis terkait kelayakan sesuai regulasi tentang pemekaran/pembentukan kecamatan dan lokasi ibukota kecamatan. Dari hasil kajian dan dinyatakan layak, maka pada tanggal 22 Desember 2012 terjadi pengresmian kecamatan Inerie sekaligus pelantikan pejabat struktural (Camat bersama pejabat eselon III-b dan IV-a, IV-b).

Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari 2 kecamatan induk yakni Kecamatan Aimere dan Kecamatan Jerebuu. Jumlah desa dari Kecamatan Aimere yang dimekarkan ke Kecamatan Inerie sebanyak 7 desa (Desa Paupaga, Desa Sebowuli, Desa Inerie, Desa Warupele II, Desa Warupele I, Desa Kelitey dan Desa Waebela) sedangkan dari Kecamatan Jerebuu sebanyak 3 desa (Desa Tiwurana, Desa Manubhara dan Desa Legeriwu) sehingga jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Aimere sebanyak 8 desa dan 2 kelurahan.

a. Luas wilayah

Luas wilayah Kecamatan Aimere setelah terjadinya pemekaran dengan Kecamatan Inerie yakni 102,34 Km² yang terdiri dari 8 Desa dan 2 Kelurahan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- 1) Utara : dengan Kecamatan Bajawa & Kec. Bajawa Utara
- 2) Selatan : dengan Laut Sawu
- 3) Timur : dengan Kecamatan Inerie
- 4) Barat : dengan Kabupaten Manggarai Timur

b. Keadaan Geografi

Wilayah Kecamatan Aimere yang membentang sepanjang pantai selatan dari bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur sampai dibagian Timur yang berbatasan dengan Kecamatan Inerie, dengan keadaan topografi berbukit-bukit dengan kemiringan 0-50 derajat. beriklim tropis dengan keadaan suhu minimum 30 derajat Celsius dan maksimum 40 derajat Celsius serta memiliki curah hujan sangat kurang. Jarak orbitasi pusat pemerintahan Kecamatan dengan desa terjauh adalah Desa Heawea yang jarak tempuhnya menelan waktu ± 8 jam dengan hanya berjalan kaki atau menggunakan kendaraan melalui Kecamatan Bajawa Utara dengan jarak 100 Km dari pusat Kota Kecamatan Aimere, sedangkan 9 desa/kelurahan lainnya dapat dilalui baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan jarak tempuh 5 sampai dengan 30 menit

c. Keadaan Toogarfi dan keadaan iklim

Secara umum Kecamatan Aimere beriklim tropis, yang disebabkan oleh dua kali pergantian musim dalam setahun, yaitu bulan November hingga

april musim hujan, dan mei hingga oktober musim panas. Sedangkan topografi lahan adalah dataran, keadaan iklim di Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan di Kabupaten pada khususnya juga menggambarkan iklim di wilayah Kecamatan Aimere.

d. Kependudukan

Jumlah Penduduk sejak tahun 2010 –2015 yang tersebar di 8 Desa dan 2 kelurahan di wilayah Kecamatan Aimere dapat dirincikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Jumlah Penduduk di Kecamatan Aimere tahun 2010 - 2015

No	Tahun	Penduduk			Jmlh KK
		Laki-laki	Perempuan	Jml	
1	2010	4.143	4.284	8.427	1.903
2	2011	4.351	4.368	8.719	1.942
3	2012	4.465	4.496	8.961	1.994
4	2013	4.444	4.565	9.009	2.016
5	2014	4.590	4.647	9.237	2.042
6	2015	4.612	4.678	9.290	2.058

Jumlah Penduduk serta jumlah kepala keluarga yang tersebar di 8 Desa dan 2 kelurahan di wilayah Kecamatan Aimere sampai dengan Desember 2015 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.

Jumlah Penduduk dan Kepala keluarga di 8 desa dan 2 Kelurahan

No	Desa/Kel	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Dusun/ Lingk.	Jmlh RT	Penduduk			Jmlh KK	Jmlh KK	Jmlh KK
					Laki-laki	Perempuan	Jmlh	Miskin	Raskin	
1	Heawea	20,00	4	8	301	277	578	119	71	142
2	Keligejo	25,62	4	12	604	610	1.214	200	136	247
3	Legelapu	4,50	4	8	640	602	1.242	230	50	247
4	Waesae	5,29	4	12	487	484	971	114	30	215
5	Kel Aimere	3,00	3	10	384	407	791	82	8	184
6	Aimere Timur	7,10	4	15	890	843	1.733	260	104	402
7	Lekogoko	6,90	4	12	440	451	891	151	100	191
8	Kel. Foa	13,25	4	16	355	388	743	158	53	178
9	Binawali	7,78	4	8	281	323	604	122	68	131
10	Kila	8,90	4	8	230	293	523	120	71	121
Jumlah		102,34	39	109	4.612	4.678	9.290	1.556	691	2.058

e. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian suatu kelompok masyarakat sangat erat kaitanya dengan kondisi lingkungan alam disekelilingnya. Jenis-jenis mata pencaharian yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat, sangat dipengaruhi oleh sumber daya tersedia, baik sumber daya flora, fauna maupun kondisi geografisnya. Dengan hal lain bahwa corak lingkungan alam yang dihadapi oleh suatu kelompok masyarakat, sedikit lebih banyak memaksa orang-orang yang hidup diwilayah tersebut untuk menempuh cara hidup yang sesuai dengan keadaan lingkungan.

Mata pencaharian hidup masyarakat di Kecamatan Aimere sebagian besa adalah petani, yang dapat dilihat dari jumlah petani yang dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bermata pencaharian yang bukan petani.

f. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan cerminan jiwa - jiwa suatu bangsa yang merupakan warisan leluhurnya sejak dahulu kala. Oleh karena itu setiap bangsa di dunia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya.

Perbedaan inilah yang merupakan ciri atau corak dari suatu bangsa dan negara tersebut. Adat istiadat itu tidak tertulis namun mempunyai sanksi-sanksi, terutama dikenakan kepada yang melanggar adat istiadat tersebut. Kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang masih tetap dipraktekan dan masih melekat adalah adat perkawinan.

Adat istiadat ini sangat menonjol di masyarakat, karena hal ini sudah menjadi tradisi yang harus dijalankan oleh masyarakat secara turun temurun. Oleh karena itu adat istiadat perkawinan sampai sekarang masih kuat, dimana pelaksanaannya melalui beberapa tahap tertentu.

3. Kondisi Pembangunan di Kecamatan Aimere Sebelum Melibatkan Tokoh Adat etnis bajawa

Kondisi pembangunan di Kecamatan Aimere sebelum tokoh masyarakat terlibat secara aktif, masih tertinggal di bandingkan kondisi pembangunan di Kecamatan lain yang tergolong di Kabupaten Ngada.

a. Responden (A) : Tokoh Adat

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan sembilan orang tokoh adat di Kecamatan Aimere yang cukup berpengaruh dan

pendapatnya biasa di dengarkan masyarakat. Berikut ini adalah daftar nama para tokoh adat yang menjadi objek penelitian skripsi ini :

- 1) Bapak Felix Wea
- 2) Bapak Fidelis Sina
- 3) Bapak Yosep Doi
- 4) Bapak Domi Doi
- 5) Bapak Alosius Nono
- 6) Bapak Yohanes Sa'i Wasi
- 7) Bapak Yosep Lako
- 8) Bapak Alo Lina
- 9) Bapak Fanus Sari

Hasil wawancara dengan responden (A), kebudayaan dan adat istiadat di Kecamatan Aimere, masih mempertahankan kebiasaan yang telah ada sejak jaman dahulu kala. Acara ritual yang masih dilakukan para warga yang beragama Katolik pada saat akan mengadakan pesta pernikahan ataupun pesta syukuran lainnya, maupun pada acara pemakaman. Masih banyak warga masyarakat yang percaya dengan kebiasaan tersebut dan melaksanakannya tetapi bukan berarti warga masyarakat tidak memiliki keyakinan.

Hasil wawancara dengan responden (A) dalam pembangunan desa (kondisi fisik), Kondisi fisik pembangunan di Kecamatan Aimere juga masih jauh tertinggal dalam hal pembangunan sarana jalan desa, jembatan desa sarana irigasi air. Oleh karena itu Kecamatan ini masih perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Ngada.

Hasil observasi peneliti, kondisi pembangunan Kecamatan di atas benar-benar nyata karena peneliti juga masih merasakan hal tersebut sebelumnya selama berada di Kecamatan Aimere, peneliti ikut melaksanakan acara ritual pergi ke tempat pemakaman dengan membawa sesajen berupa makanan (*ti'i maki ine ebu*), apabila akan melaksanakan pesta syukuran. Secara umum kebiasaan tersebut dilaksanakan apabila pada hari Paskah dan Tahun Baru. Transportasi yang lewat masih terbatas karena kondisi pembangunan jalan raya, jembatan dan jalan di Kecamatan Aimere masih rusak.

b. Responden (B) : Masyarakat di Kecamatan Aimere

Penulis juga melakukan wawancara dengan sebelas anggota masyarakat di Kecamatan Aimere yang berhubungan dengan para tokoh – tokoh adat etnis bajawa. Berikut ini adalah daftar nama para anggota masyarakat yang menjadi objek penelitian skripsi ini :

- 1) Bapak Heri Weru
- 2) Bapak Bene Thay
- 3) Bapak Enda Ressi
- 4) Bapak Fortin Waso
- 5) Bapak Ugen kila
- 6) Bapak Nardin Soda
- 7) Bapak Charles Tuga
- 8) Bapak Dorus Tuga
- 9) Bapak Beni Lae
- 10) Bapak Jhony Wea

11) Bapak Raimundus Raja

Hasil wawancara dengan responden (B), selaku warga masyarakat di Kecamatan Aimere mengatakan bahwa kondisi pembangunan sebelumnya masih jauh tertinggal. Kesadaran warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah masih rendah. Hal tersebut terbukti pada dengan masih banyak pembangunan yang tidak berjalan karena anggota masyarakat yang belum memberikan sumbangsih demi tercapainya pembangunan. Warga di Kecamatan Aimere memiliki kecendrungan untuk lebih mendengarkan saran – saran dari tokoh – tokoh adat di bandingkan dengan imbauan pemerintah daerah.

B. pembahasan

1. Peran Kepemimpinan Tokoh Adat

Para tokoh – tokoh adat etnis bajawa sebagian besar memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis. Para tokoh adat etnis bajawa dalam menyelesaikan permasalahan selalu mengutamakan asas kekeluargaan, musyawarah, dan lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Gaya kepemimpinan yang seperti ini membuat para tokoh adat etnis bajawa sangat disenangi dan di hormati oleh masyarakat setempat sehingga dalam melaksanakan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.

a. Peran Kepemimpinan Tokoh Adat Sebagai Mediator

Tugas Kepala Adat adalah membina dan memelihara kerukunan warga, ini berdasarkan Hukum Adat tahun 2004. Dalam hal ini Kepala Adat wajib membinadan memelihara kerukunan warganya agar tercipta kesinambungan hidup antar warga dan tidak ada perselisihan yang membuat kehidupan tidak aman

dianterim.Kepala Adat harus cepat tanggap untuk menangani masalah yang dialamiwarganya agar masalah tersebut tidak meluas dan mengganggu masyarakatsekitarnya. Selain itu Kepala Adat wajib membarikan Pembinaan terhadap wargyanentang kerukunan, keamanan, dan ketertiban.Disini dapat diketahui bahwa Adat mem punyai wewenang/ berhak atas setiap perkara yang diajukan kepada Adat.

Dengan demikian Peran Kepemimpinan tokoh - tokoh Adat etnis bajawa sangat membantu pemerintah Kecamatan Aimere dengan pembinaan dan memelihara kerukunan warganya sehinggaprogram-program pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar terutamaprogram-program yang mengenai masyarakat guna menuju pembangunan yangdiharapkan khususnya di Kecamatan Aimere.

1. Fungsi Penyelesaian Konflik

Di daerah Kecamatan Aimere konflik sengketa kepemilikan tanah merupakan konflik yang utama dan seringkali menimbulkan korban jiwa. Pemerintah daerah sudah berupaya untuk meredakan konflik yang ada namun tanpa adanya keterlibatan tokoh adat etnis bajawa membantu, konflik yang ada masih sangat sulit untuk didamaikan. Keterlibatan tokoh adat etnis bajawa dalam membantu pemerintah menyelesaikan konflik sengketa tanah merupakan bantuan besar bagi kemajuan pembangunan.contoh kasus yang telah di lakukan oleh kepemimpinan tokoh adat sebagai mediator di dalam menyelesaikan konflik adalah sebagai berikut;

- a. Masalah sengketa kepemilikan tanah di suku Sede, suku Boro, Suku Kewi, dan Suku Genga yang bertempat di Kelurahan Foa kecamatan Aimere telah di bantu oleh pata tokoh adat dalam proses penyelesaiannya dan telah diselesaikan juga oleh keputusan pengadilan.
- b. Masalah sengketa tanah kompleks kelurahan Fo'a di Kecamatan Aimere telah di bantu penyelesaian oleh tokoh – tokoh adat dan pemerintah Kecamatan Aimere dengan jalan memberikan ganti rugi kepada suku Sede untuk tahap pertama dan masih menunggu realisasi dana untuk ganti rugi tahap kedua.
- c. Masalah tanah Suku Pau, Suku Fuy dan Suku Woe jawa di desa Aimere Timur telah di laksanakan pertemuan untuk ketiga suku di tingkat kecamatan. musyawarah bersama telah menghasilkan keputusan untuk dilakukan pembagian tanah oleh saudara Bene Thay (Ketua suku Fuy).
- d. Masalah tanah di Kompleks TPI Aimere di desa Aimere Timur telah di bantu penyelesaian oleh tokoh adat dan pemerintah sehingga sebagian besar warga yang mendiami kompleks TPI telah mengosongkan bangunannya.
- e. Masalah tanah di SDI Aimere : Tanah tersebut telah memiliki sertifikat oleh pihak Pemerintah Daerah namun tetap diklaim oleh saudari Ester Hau sebagai tanah miliknya yaitu dengan memungut hasil kebun yang ada di lokasi tersebut (pisang dan ajambu). Pihak Sekolah telah melaporkan kepada pihak berwajib dan tokoh adat setempat. Tokoh adat

setempat dan pemerintah mengusahakan penyelesaian masalah dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan.

f. Masalah Tanah di Kompleks kantor Desa Heawe : Sengketa pembangunan rumah adat suku Longga Rii diatas sebidang tanah yang telah dibangun kantor Desa. Tokoh adat setempat masih melakukan musyawarah dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik.

2. Fungsi penyelesaian ketimpangan sosial

Di daerah kecamatan aimere adalah daerah yang mudah dan rentan akan pengaruh perkembangan arus globalisasi sehingga budaya juga mengalami ketimpangan. akibat dari adanya globalisasi yang masuk begitu cepat dapat mempengaruhi budaya asli yang dapat luntur sesuai dengan semakin berkembangnya globalisasi. munculnya sifat dan gaya konsumerisme adalah dampak dari masuknya budaya asing. jika sistem nilai dan norma yang ada dalam masyarakat tidak mampu mengantisipasi hal tersebut, maka akan muncul kebingungan (anomie) dalam masyarakat.

oleh karena itu peran penting kepemimpinan tokoh adat adalah sebagai mediator di dalam menyelesaikan masalah tersebut. kepemimpinan tokoh adat sebagai mediator menjadi tokoh penting didalam memperkenalkan adat budaya asli etnis bajawa dalam hal ini budaya kecamatan aimere kepada generasi muda. sehingga generasi muda tidak terpengaruh dengan arus globalisasi dan budaya asing yang masuk dan budaya asli.

kepemimpinan tokoh adat juga berfungsi untuk mengajak masyarakat dan generasi muda kecamatan aimere untuk memperkenalkan budaya asli sehingga di kenal oleh nasional dan menjadi salah satu obyek wisata sehingga membantu masyarakat di dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata.

kepemimpinan tokoh adat sebagai mediator adalah sebagai berikut;

Seperti hal yang terjadi dalam Kecamatan Aimere pada saat pembangunan dilaksanakan ada beberapa warga yang kurang mendukung pembangunan tersebut karena pembangunan tersebut dianggap merugikan mereka, pembangunan pelebaran jalan yang melalui tanah warga yang terdapat tanaman sebagai sumber penghasilan bagi mereka sangat tidak disetujui oleh beberapa warga desa. Dalam menyelesaikan masalah ini tokoh – tokoh adat di Kecamatan Aimere mengajak masyarakat yang bersangkutan untuk bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang baik dari masalah tersebut. Dalam musyawarah yang dilakukan belum bisa ditemukan keputusan yang baik karena warga yang tanahnya sebagai sarana pembangunan tetap bersikeras untuk tidak merelakan tanahnya sebagai sarana pembangunan dengan alasan adanya tanaman yang menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Melihat hal ini kepala Adat Turun tangan dengan harapan warga yang tidak terima tanahnya sebagai sarana pembangunan jalan dapat mengiklaskan tanahnya tersebut. Kepala Adat sebagai orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakat adat menyampaikan kepada warga nya bahwa pentingnya suatu pembangunan seperti pembangunan jalan yang sudah diprogramkan, disampaikan oleh kepala adat pembangunan jalan dilakukan demi

kepentingan umum agar wilayah tersebut lebih baik dari sebelumnya setelah menyampaikan bagaimanapentingnya pembangunan yang sudah diprogramkan. Kepala Adat berharap warganya kurang sepatok dengan adanya pembangunan pelebaran jalan tersebut maumenerima pembangunan tersebut.

b. Peran Kepemimpinan Tokoh Adat Sebagai Komunikator

Kepala Adat sangat dekat dengan masyarakat dan sangat dihormati sehingga pesan-pesan yang disampaikan mengenai program pembangunan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Peran kepemimpinan tokoh adat sebagai fasilitator komunikasi tetap dijalankan karena tokoh adat mampu melakukan pendekatan dalam memberikan informasi mengenai program pembangunan. *Peran Kepala Adat dalam Pembangunan di Desa (Ardian Supriadi)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Para tokoh – tokoh Adat, aparatur desadan masyarakat desa di Kecamatan Aimere, adapun upaya yang dilakukan kepala adat sebagai pemuka pendapat dalam menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi yaitu, kepala adat sebagai pemuka pendapat mendapatkan informasi atau pesan program pembangunan desa dari pemerintah desa kemudian kepala adat meneruskan dan menyampaikan informasi kepada warga serta berupaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan jalan remukan.

Dalam Aktivitas pembangunan, Para Tokoh adat menggunakan komunikasi tatap muka (*face to face*) merupakan salah satu cara komunikasi yang cukup efektif karena komunikator bisa langsung berkomunikasi dengan sasaran. Karena dari komunikasi ini kita mengharapkan perubahan tingkah laku dari komunikasikan. Peran kepala adat di Kecamatan Aimere sebagai komunikator

telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari faktor daya tarik komunikator dan ikatan emosional yang kuat menjadi sumber kepercayaan komunikator dalam mensosialisasikan program pembangunan. Kepala Adat melakukan tugasnya yaitu dengan mengajak, mengenalkan, dan memberikan penjelasan tentang pembangunan kepada masyarakat. Apabila masyarakat siap menerima pembangunan tersebut, maka masyarakat harus mendukung dan terlibat dalam pembangunan tersebut.

Dalam merencanakan suatu pembangunan tentu terlebih dahulu menyusun rencana karena tanpa ada suatu perencanaan maka pembangunan itu tidak dapat dilakukan dengan begitu saja. Untuk mencapai suatu rencana yang menyangkut kepentingan umum khususnya pembangunan yang menyangkut langsung pada masyarakat yang menyangkut juga dengan kepentingan umum maka harus diadakan musyawarah terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait dalam perencanaan tersebut tentunya juga diharapkan juga dukungan dan partisipasi dari semua pihak masyarakat yang peduli terhadap pembangunan.

Pariwisata merupakan salah satu aset yang perlu di lestarikan dan ditingkatkan pemanfaatannya namun di Kecamatan Aimere, lokasi-lokasi yang sangat potensial belum dijamah secara baik oleh dinas yang terkait maupun oleh pengelola swasta.

Lokasi pariwisata yang perlu diperhatikan diantaranya :

- a. Kampung Adat Bela di Desa Keligejo
- b. Pantai Ena Lewa di Desa Legelapu
- c. Gua Alam Lia Roja di Desa Keligejo

Dalam penelitian ini peran tokoh – tokoh adat adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi pada perencanaan perbaikan jalan dan mendukung berkembangnya pariwisata yang ada. Dalam hal ini kepala adat merupakan fasilitator pemerintah untuk melancarkan proses pembangunan yang akan diselenggarakan atau di laksanakan. Dalam hal ini Kepala Adat memberikan pengarahan serta pengertian bagi masyarakat Kecamatan Aimere yang lahannya atau batas wilayah tanahnya yang menjadi sasaran pembangunan agar dapat merelaksanya demi kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan yang telah direncanakan. Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa peran kepala adat pada perencanaan pembangunan sangat berpengaruh pada perencanaan pembangunan pelebaran jalan. Karena dalam hal ini kepala adat yang memberikan informasi tentang perencanaan pembangunan pelebaran jalan kepada masyarakat. Peran Kepala Adat dalam perencanaan pembangunan pelebaran jalan adalah pemberi informasi kepada masyarakat. Kepala Adat memberikan arahan kepada masyarakat perencanaan pembangunan pelebaran jalan. Peran Kepala Adat Dalam Pembangunan di Desa (Ardian Supriadi) Pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan yang menjadi pendukung ialah dengan adanya pemerintah kabupaten dalam bidang sarana dan prasarana, mengisyaratkan program prioritas dalam pembangunan dari pemerintah yang menjadi pendukung ialah dengan adanya program teknologi sekarang dan tercipanta berbagai sarana (radio, hand phone dan televisi) antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

1. Perencanaan Pembangunan Saluran air minum di desa yang belum memiliki Saluran Air minum

Tahap awal pembangunan adalah perencanaan yaitu serangkaian kegiatan mulai dari mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sampai dengan penetapan pembangunan. Masyarakat akan lebih percaya program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaannya, karena dengan demikian mereka dapat mengetahui seluk-beluk program pembangunan tersebut. Peran Kepala Adat dan tokoh kampung dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program pembangunan saluran air minum, dimana dalam hal ini mengajak semua masyarakat Kecamatan Aiemere untuk turut serta terlibat dalam gotong royong dalam pembangunan saluran air minum tanpa kecuali. Berkaitan dengan peran kepala adat dalam perencanaan pembangunan saluran air minum, dalam hal ini tokoh – tokoh adat di Aiemere sangat memperhatikan masyarakatnya dan selalu memberikan kesempatan pada masyarakatnya untuk menyumbangkan ide-ide dalam hal ini apapun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, kepala adat selalu selalu memerikan arahan pada masyarakat agar tidak kaku untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun. Hasil observasi di lapangan masyarakat Kecamatan Aiemere mengakui bahwa ide-ide dari tokoh - tokoh adat yang meminta agar pembangunan saluran air minum mendapat dukungan dari tokoh kampung dan tokoh masyarakat serta dukungan dari semua masyarakat. Tujuan dari pembangunan saluran air minum ini adalah agar sumur bersih yang ada di ujung desa bisa digunakan oleh masyarakat danantisipasi pada musim kemarau.

Tokoh – tokoh adat selalumenghimbau/mengajak masyarakat untuk bekerja sama dan tetap menjaga nilai - nilaiadat istiadat serta mempererat tali persaudaraan dan kerja sama antarmasyarakat.Peran Kepala Adat dalam pelaksanaan pembangunan saluran air minum inisangat di banggakan oleh masyarakat, karena dalam pelaksanaannya para tokoh - tokoh adatmengajak semua masyarakat di Kecamatan Aimere untuk saling bekerja sama dan bergotong royong.Dalam bergotong royong masyarakat merasa rasa kebersamaanantara masyarakat semakin erat.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kecamatan Aimere masih tergolong rendah, angka anak – anak yang putus sekolah meningkat. Program pemerintah telah memberikan bantuan dana untuk anak – anak yang kurang mampu, namun kesadaran masyarakat untuk meraih pendidikan yang lebih baik masih sangat kurang. Keterlibatan tokoh adat etnis bajawa dalam setiap kegiatan ataupun acara adat yang menyinggung tentang pentingnya pendidikan yang tinggi telah membantu mempengaruhi pandangan masyarakat untuk meraih pendidikan yang lebih baik sehingga angka anak – anak yang putus sekolah dapat ditekan.

3. Kebudayaan dan adat istiadat

Kebudayaan dan adat istiadat di kecamatan Aimere Kabupaten Ngada masih sangat terpelihara. Kepercayaan kepada leluhur dan nilai adat yang lama sangat kuat. Pembangunan yang terjadi sering mengalami hambatan karena masyarakat setempat masih mengutamakan nilai adat leluhur. Sebagai contoh, ketika pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan gedung ataupun

pelebaran jalan, sebagian masyarakat masih belum bersama – sama membantu mensukseskan pembangunan dengan memberikan lahan karena masih menganggap tanah mereka merupakan tanah leluhur dan tidak boleh diubah. Keterlibatan tokoh adat etnis bajawa yang memberikan pengertian – pengertian kepada masyarakat secara perlahan – lahan akhirnya berhasil membuka kesadaran masyarakat untuk lebih terbuka memberikan sumbangsih pembangunan dan tetap tidak menjaga kelestarian adat.

3. Pembangunan Sarana dan prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana di kecamatan Aimere masih terhambat karena masalah lahan. Pemerintah telah berupaya untuk menyediakan lahan pembangunan tetapi sebagian besar masyarakat belum setuju untuk berkontribusi dalam pembangunan. Keterlibatan tokoh adat etnis bajawa dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat secara perlahan – lahan telah membuka wawasan masyarakat untuk turut serta mensukseskan pembangunan.

4. Pembangunan Pariwisata

Daerah – daerah di Kecamatan Aimere memiliki banyak keindahan dalam segi pariwisata. Banyaknya tempat wisata seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, namun pengembangan tempat – tempat wisata masih menjadi kendala karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangsih pengembangan kekayaan daerah. Keterlibatan tokoh adat etnis bajawa sebagai komunikator dan mediator sangat membantu pemerintah untuk mengembangkan tempat – tempat pariwisata yang ada sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah.

d. Peran kepemimpinan Tokoh Adat sebagai transparansi

1. Pengertian Transparansi

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public.

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ;

- a) Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan
- b) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Agus Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straightforward and easy to apply” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi

mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely and readily available).

Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a) Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam kepemimpinan tokoh adat etnis bajawa bagi pembangunan daerah.

a. Peran Kepemimpinan Tokoh Adat dalam bidang Pendidikan

Dalam aktivitas pembangunan, pembangunan dalam bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena generasi muda yang berpendidikan tinggi akan menjadi tonggak berdirinya suatu bangsa. Peran Kepemimpinan tokoh adat di Kecamatan Aimere dalam bidang pendidikan bisa dikatakan cukup memuaskan karena melalui komunikasi yang baik, tokoh – tokoh adat dalam berbagai bentuk cara selalu menekankan anak – anak muda untuk tetap bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Di Kecamatan Aimere terdapat pendidikan non formal serta kursus-kursus keterampilan bagi generasi muda dan

masyarakat yang dikelola oleh sanggar kegiatan belajar (SKB Ngada) dengan kegiatannya adalah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Paket A dan B yang dikelola oleh cabang Dinas PKPO

Kondisi pembangunan di Kecamatan Aimere sebelum dan setelah keterlibatan Kepemimpinan Tokoh Adat etnis bajawa adalah :

Dalam menjalankan peran sebagai Komunikator dan mediator dalam pembangunan di kecamatan Aimere, para tokoh adat etnis bajawa menemukan beberapa hambatan. Berikut hambatan - hambatan yang dialami oleh para tokoh – tokoh etnis bajawa dalam pembangunan daerah :

1. Dalam menyelesaikan konflik terutama sengketa tanah, tokoh – tokoh adat etnis bajawa mengatakan bahwa penduduk di daerah Kecamatan Aimere memiliki temperamen yang keras dan memiliki kecendrungan menyelesaikan masalah secara kontak fisik. Pendekatan persuasif harus dilakukan secara perlahan dan terus menerus untuk mendamaikan konflik yang ada.
2. Kebudayaan dan Adat istiadat yang kaku masih di pegang oleh penduduk di Kecamatan Aimere sehingga program pemerintah untuk pambangunan masih mengalami benturan dengan nilai kebudayaan dan adat istiadat setempat.
3. Sarana dan prasarana masih belum dibangun dengan baik karena tingkat pendidikan penduduk yang masih kurang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada mendukung program pambangunan oleh pemerintah. Pada pambangunan dalam bidang pariwisata masih kurangnya teknologi, daya kreativitas, dan penyebaran informasi merupakan kendala utama dalam pengembangannya.

b. Peran Kepemimpinan Tokoh Adat dalam bidang Budaya (*akulturasi*)

Kebudayaan dan adat istiadat di kecamatan Aimere Kabupaten Ngada masih sangat terpelihara. Kepercayaan kepada leluhur dan nilai adat yang lama sangat kuat. Pembangunan yang terjadi sering mengalami hambatan karena masyarakat setempat masih mengutamakan nilai adat leluhur. Sebagai contoh, ketika pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan gedung ataupun pelebaran jalan, sebagian masyarakat masih belum bersama – sama membantu mensukseskan pembangunan dengan memberikan lahan karena masih menganggap tanah mereka merupakan tanah leluhur dan tidak boleh diubah.

Keterlibatan tokoh adat etnis bajawa yang memberikan pengertian – pengertian kepada masyarakat secara perlahan – lahan akhirnya berhasil membuka kesadaran masyarakat untuk lebih terbuka memberikan sumbangsih pembangunan dan tetap tidak menjaga kelestarian adat.

c. Peran Kepemimpinan Tokoh Adat dalam bidang Informasi dan Teknologi

Teknologi menghasilkan Akulturasi atau perpaduan dua unsur kebudayaan tanpa menghilangkan budaya yang asli. Teknologi pembelajaran dapat dilihat sebagai bidang yang mempunyai perhatian khusus terhadap aplikasi, meskipun prinsip dan prosedurnya berdasar pada teori. Kawasan bidang ini telah melalui pergulatan antara pengaruh nilai, penelitian, dan pengalaman praktisi, khususnya pengalaman dengan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Bidang ini kemudian berkembang tidak hanya berupa pengetahuan teoritik tetapi juga pengetahuan praktis.

Setiap kawasan dibentuk oleh : (1) landasan penelitian dan teori; (2) nilai dan perspektif yang berlaku; (3) kemampuan teknologi itu sendiri. Kekuatan teknologi pembelajaran memang terletak pada teknologi itu sendiri. Kemajuan dalam teknologi akan banyak merubah hakekat praktek dalam bidang teknologi pembelajaran. Teknologi telah memberikan prospek munculnya stimulus yang realistik, memberikan akses terhadap sejumlah besar informasi dalam waktu yang cepat, menghubungkan informasi dan media dengan cepat, dan dapat menghilangkan jarak antara pengajar dan pembelajar (Hannfin, 1992). Perancang yang terampil dan kreatif dapat menghasilkan produk pembelajaran yang dapat memberikan keunggulan dalam : (a) mengintegrasikan media;

(b) menyelenggarakan pengendalian atas pembelajar yang jumlahnya hampir tidak terbatas, dan bahkan (c) mendesain kembali untuk kemudian disesuaikan kebutuhan, latar belakang dan lingkungan kerja setiap individu. Teknologi, disamping mampu menyediakan berbagai kemungkinan tersedianya media pembelajaran yang lebih bervariasi, juga dapat mempengaruhi praktek di lapangan dengan digunakannya sarana berbasis komputer untuk menunjang tugas perancangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini dibahas berdasarkan hasil penelitiandan dokumentasi dari fokus penelitian adalah :

1. Tokoh adat etnis bajawa memiliki peran yang sangat penting dalam kepemimpinan yang demokratis. Hal ini di tandai dengan peran kepemimpinan tokoh adat yang selalu mencari jalan musyawarah dan lebih mengutamakan kepentingan umum dalam penyelesaian masalah. Keterlibatan tokoh – tokoh adat etnis bajawa dalam pembangunan daerah kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, Propinsi NTT dan Kespemimpinan tokoh Adat sebagai Komunikator dan Mediator sangat berpengaruh positif, karena tokoh – tokoh adat sangat dekat dan di hormati oleh masyarakat sehingga pesan – pesan yang disampaikan mengenai program pembangunan dapat diterima, di pahami dan dijalankan oleh masyarakat.
2. Faktor – faktor rendahnya tingkat pendidikan, kekurangan teknologi dan informasi serta adat istiadat leluhur yang kaku merupakan faktor – faktor yang merupakan kendala bagi tokoh – tokoh adat etnis bajawa dalam membantu pembangunan daerah.

B. Saran

Dalam menjalankan peran dan fungsi yang di embannya sebagai Kepala Adat, perlu kiranya pemerintah daerah memperhatikan tunjangan atau gaji yang di berikan kepada Kepala Adat, karena selama ini tunjangan atau gaji yang di dapatkan sangat sedikit dan tidak sebanding dengan harga-harga barang yang kian menanjak. Perlu adanya alokasi gedung dalam menunjang peran dan tugas sebagaipemimpin dalam hal ini perlu adanya suatu realisasi gedung tersebut yang di gunakan sebagai kantor adat yang dapat di gunakan tokoh – tokoh Adat pada saat bekerja.

Ketersediaan Sarana dan prasarana (teknologi dan informasi) yang masih kurang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah daerah maupun pemerintah yang berada di kabupaten Ngada, NTT. Dengan adanya harapan bantuan tersebut akan lebih meningkatkan pencapaian kualitas peran dan fungsi Tokoh - tokoh dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Fahmi, Irham. 2014. *Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi dan Kasus*. Alfabeta :Bandung

Halsey, A.H. (2000) "Hirarki" dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, (ed) (2000) *Ensiklopedi Ilmu ilmu Sosial*, Jilid 2, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halm.433-435

Kitab Hukum Kanonik (*Edisi Resmi Bahasa Indonesia*), Sekretariat KWI (ed.), cet. ke-1, KWI, Jakarta, 2006.

Koendjaraningrat, 2000. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Djembatan.

Koendjaraningrat, 2002. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Umum Jakarta.

Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 7 Desember 1965 (no.47-52) Tolib Setiady, (2008). *Intisari Hukum Adat di Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.

Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perubahan : dari Teori Ke Praktik*, Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sanderson Stephen K., *Sosiologi Makro Edisi II*, Pengantar Edisi Indonesia oleh Hotman M. Siahaan.

Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, Jakarta: PT raja grafindo persada. Aksara.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Edisi III, oleh Soerjono Soekanto
SH. MA.Sumber .<http://google.com>.
Sugiono,2012 Teknik Analisis data,Menurut Miles dan Huberman

B. BUKU PENELITIAN

Sukanto, soeyono 1958 '*Pengantar Penelitian Ilimiah Metode dan Teknik*'
Tarsinto Bandung.

Natsir ,M,ph, D 1983, '*Metode Penelitian*' ,Jakarta Ghalia INA.

C. DOKUMEN-DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang *pemerintahan daerah*.

Undang-Undang otonomi daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang '*perda*'

UU N UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

UU No 12 tahun 2008 tentang pemerinatahan daerah

